LAPORAN

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TRIWULAN III (TIGA)
TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PENGGUNALAYANANPENGADILAN

DIPENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor16 Tahun2014
TRIWULAN KE III (TIGA)
Tahun 2020

Mengetahui

KETUA TIM ZI	PEMBINA TIM ZI
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI	KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA	TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Dr. Kadar Slamet, SH.M.Hum.	H. SULISTYO, SH.M.Hum
NIP. 19550707 198403 1002	NIP. 19550815 198403 1001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkas dan karuniaNYA, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat melaksanakan Survei terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) **TRIWULAN III (TIGA) Tahun 2020** untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Dilaksanakannya survey IPK ini merupakan wujud komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan melayani sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi ini adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Hasil pelaksanaan survey nantinya akan menjadi referensi pengambilan kebijakan pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencegah Korupsi dan Nepotisme di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 5 Oktober 2020.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KETUA

H. SULISTYO, SH.M.Hum
NIP. 19550615 198403 1001

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 1

1.3 Landasan Hukum 1

1.4 Rencana Kerja 1

BAB II 1

METODOLOGI 1

2.1 Metode Penelitian 1

2.2 Populasi dan Sampel 1

2.3 Lokasi Penelitian 1

2.4 Teknik Pengumpulan Data 1

2.5 Teknis Analisis Data 1

2.6 Tahap Pelaksanaan 1

BAB III 1

INDEKS PERSEPSI KORUPSI 1

3.1 Profil Responden 1

3.2 IPK per Indikator 1

3.3 IPK Satuan Kerja 1

BAB IV 1

PENUTUP 1

4.1 Kesimpulan 1

4.2 Rekomendasi 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang akan ditetapkan oleh Tim Pemeriksa Intern (TPI) untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan

  a. Kuesioner.

  b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar

  c. Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

  a. Jumlah Responden.

  b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal

  Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tingkat Pertama dan Pegadilan Tingkat Banding.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. ***Kedua***, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

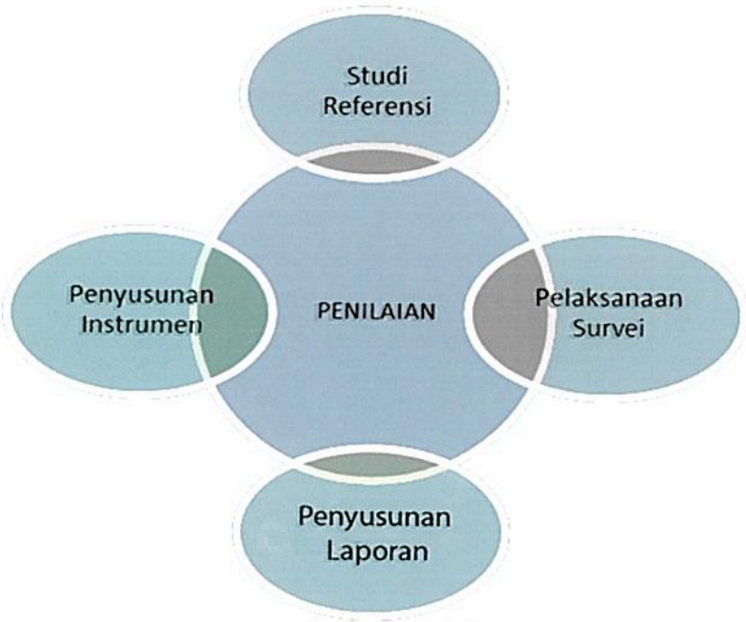

Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah

8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Dasar dan Menengah.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN	FREKUENSI	%
1	SD	0	0
2	SMP	0	0
3	SMU	0	0
4	D III	8	8
5	Sarjana	56	56
6	Pasca Sarjana	39	39
7	Tidak Mencantumkan	5	5
	Jumlah	100	100 %

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **69 %** responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah Pegawai Negeri Sipil

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No	PekerjaanUtama	Frekuensi	%
1	Wiraswasta	7	7
2	Pelajar/ Mahasiswa	0	0
3	Lainnya	0	0
4	PNS	69	69
5	TNI/POLRI	0	0
6	Advokat	14	14
7	Tidak mencantumkan Pekerjaan	10	10
Jumlah		100	100 %

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 30 tahun s/d 50 tahun. Bagi kelompok usia di atas 55 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 6.

Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	20-30		
2	31-40	27	27
3	41-50	25	25
4	51-60	28	28
5	61>	2	2
6	Tidak mencantumkan Usia	18	18
Jumlah		100	100 %

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 29

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersih dari Manipulasi Peraturan

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

NO	SKALA	FREKUENSI	%
1	4	100	100
2	3	0	0
3	2	0	0
4	1	0	0
	Jumlah	100	100 %

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 25

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersih dari Penyalah Gunaan Jabatan

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

NO	SKALA	FREKUENSI	%
1	4	100	100
2	3	0	0
3	2	0	0
4	1	0	0
	Jumlah	100	100 %

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 25

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

NO	SKALA	FREKUENSI	%
1	4	100	100
2	3	0	0
3	2	0	0
4	1	0	0
	Jumlah	100	100 %

3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index28

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tabel 12.

Indeks pada indikator transparansi biaya

NO	SKALA	FREKUENSI	%
1	4	100	100
2	3	0	0
3	2	0	0
4	1	0	0
	Jumlah	100	100 %

3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index26

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

NO	SKALA	FREKUENSI	%
1	4	100	100
2	3	0	0
3	2	0	0
4	1	0	0
	Jumlah	100	100 %

3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 19

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tabel 14.

Indeks pada indikator tambahan biaya

NO	SKALA	FREKUENSI	%
1	4	100	100
2	3	0	0
3	2	0	0
4	1	0	0
	Jumlah	100	100 %

3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 20

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tabel 15.

Indeks pada indikator hadiah

NO	SKALA	FREKUENSI	%
1	4	100	100
2	3	0	0
3	2	0	0
4	1	0	0
	Jumlah	100	100 %

3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index31

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tabel 16.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

NO	SKALA	FREKUENSI	%
1	4	100	100
2	3	0	0
3	2	0	0
4	1	0	0
	Jumlah	100	100 %

3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 32

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17.

Indeks pada indikator percaloan

NO	SKALA	FREKUENSI	%
1	4	100	100
2	3	0	0
3	2	0	0
4	1	0	0
	Jumlah	100	100 %

3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 32

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tabel 18.

Indeks pada indikator perbuatan curang

NO	SKALA	FREKUENSI	%
1	4	100	100
2	3	0	0
3	2	0	0
4	1	0	0
	Jumlah	100	100 %

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki **Indeks Persepsi Korupsi 3,96** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI dengan nilai interval Konversi IPK 81,26-100,00**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 100 %
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 100 %
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 100 %
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 100 %
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 100 %
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 100 %
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 100 %
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 100 %
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 100 %
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 100 %

4.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks **3,96 %** atau masuk pada persepsi **BERSIH DARI KORUPSI** .

LAMPIRAN

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

TRIWULAN III

TAHUN 2020

INDEK PERSEPSI KORUPSI (IPK)

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

TRIWULAN III (TIGA)

TAHUN 2020

NILAI IPK	NAMA LAYANAN : PELAYANAN PENGADILAN
3, 96 **BERSIH DARI KORUPSI**	**INDIKATOR** 1. Manipulasi Aturan : 100 % 2. Penyalahgunaan Jabatan : 100% 3. Menjual Pengaruh : 100% 4. Transparansi Biaya : 100 % 5. Transaksi Rahasia : 100% 6. Biaya Tambahan : 100% 7. Hadiah : 100% 8. Transparansi Pembayaran : 100% 9. Pembuatan Curang : 100%

TERIMAKSIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Satuan kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Alamat : JALAN CIKINI RAYA No. 117 JAKARTA PUSAT

No	Responden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Keterangan
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ujang Solihin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	Enrico Simanjuntak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	Dyah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	ELFIANY, S.H., M.Kn	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	bambang soebiyantoro	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	Budiamin Rodding	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	Dewa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	Sufi Aryani, SE.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	Nelvy christin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	Esau Ngefak SH.MH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	Dyah ayu Rachma permatasari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	Oenoen Pratiwi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	Hari Hartomo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	Sutiyono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	FEBBY FAJRURRAHMAN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	indah mayasari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	Syafaat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	Andry Asani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., SH., MH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	Dra. Eni Nuraeni	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	Liza valianty	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	Yustan Abithoyib	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	Yarwan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	Lusinda panjaitan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	Hastin Kurnia Dewi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	Dr. Andi Muh. Ali Rahman, SH., MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	Ono haryono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	Andri Mosepa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	Bagus Darmawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	Merna cinthia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	Bonnyarti Lande	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	Ida Faridha, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	Umar Dani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	Danan priambada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	Maryam Nur Hidayati, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	Sugiyanto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	Akhdiat Sastrodinata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	KEMAS MENDI ZATMIKO SH. MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	Agnesia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	Muhammad Syafiq	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	Vino Dita Tama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	Setio Nugroho Saroso	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	Sumaja	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45	Febrina permadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	Retno Nawangsih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47	Dwi Hernuningsih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	Harry hersugiarto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	Hanifah Hanifah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	Haru Sunaryo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	Edi Firmansyah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
52	Ratna	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
53	Yudhie	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
54	Lenti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
55	Nia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
56	Yunita	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
57	Natalia Angelica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
58	Widy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
59	Hartini effendy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
60	Natalia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
61	Bambang Widodo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
62	Abdukhi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
63	Mahmudi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
64	Donna	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
65	Greisy rivta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
66	Arman	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
67	Andika safril	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
68	SUHERMAN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
69	Nely	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
70	Nuzulyah Apri Cella	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
71	Sri Rahayu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
72	Rika woelandari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
73	Ayu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
74	Andreas Kusmaedi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
75	H. JAEDI, SH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
76	Rena Aulia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
77	MAS MUHAMMAD FERDIANSYAH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
78	Imanuel M. Nabuasa, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
79	Beni M. Kadarisma	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
80	Supriansyah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
81	DAYU SETIA NUGRAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
82	Dhonni	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
83	Mokhamad Amirudin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
84	Iftah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
85	Anditiawarman Basrul	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
86	MARINA ADHARIANTI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

87	Heru Pamungkas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
88	Boby Valiandra	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
89	Jaja Setiadijaya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
90	Rosid	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
91	Aditya Apriza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
92	Pusphitaria B. P.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
93	Mardian Haryadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
94	Arief Sidhartama Putra	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
95	Sabar Maruli Simamora	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
96	Richard	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
97	Rene Putra Tantrajaya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
98	Hisyam	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
99	Soraya I. Fabanyo, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
100	Edi Alinurhaedi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	
	N.Rata-rata	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	39.6
	NRR Tertimbang	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	3.96

NILAI IPK : 3.96

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	Selalu
1.76-2.50	43.76-62.50	2	Sering
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Jarang
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Tidak Ada

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA

H. SULISTYO, SH.M.Hum
NIP. 19550815 198403 1001